

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2022



DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi serta keberhasilan capaian sasaran dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kami susun dapat meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang di masa mendatang.

Semarang, 7 Februari 2023
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai Rancangan RPJMD Kota Semarang 2021-2026, telah ditetapkan 5 (lima) program RPJMD Kota Semarang. Dari kelima program tersebut, terdapat 1 (satu) misi/program yang merupakan bagian penugasan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, yaitu: **“Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota”**. Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah

1. Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.
2. Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang antara lain:

1. Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob.

Dengan meningkatnya kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang yang optimal diharapkan dapat terwujud Kota Semarang yang bebas dari banjir dan rob sehingga dapat meningkatkan kualitas Kota Semarang untuk mencapai kota yang tangguh, produktif dan berkelanjutan.

2. Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan.

Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan merupakan penunjang dalam aktivitas masyarakat kota Semarang untuk menjadi lebih tangguh dan produktif.

3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD

Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD menjadi kunci awal keberhasilan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat Kota Semarang.

Realisasi kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tergambar pada tabel berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2022			Realisasi tahun 2021
			Target	Realisasi	Satuan	
1.	Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	Persentase kawasan banjir.	3,02	2,37	%	3,40%
		Persentase kawasan rob.	1,85	1,11	%	2,00%

2.	Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap.	92,50	92,52	%	92,38
		Persentase jembatan dalam kondisi baik.	55,75	86,45	%	NA
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	74.50	96,91	%	

Untuk realisasi indikator kinerja program terangkum dalam tabel berikut:

Kode	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
			Target	Realisasi	Satuan	
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum	100	100	%	100
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan dinas pekerjaan umum	100	100	%	100
		Persentase peningkatan kemampuan ASN dinas Pekerjaan Umum	100	100	%	100
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	97,57	98,26	%	97,30
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	64,00	64,00	%	NA
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kualitas Infrastruktur jalan jembatan	74,13	89,49	%	73,95

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja antara lain:

Dikarenakan adanya refocusing anggaran pada tahun 2020 dan 2021 maka terdapat beberapa sub kegiatan yang dianggarkan kembali pada tahun 2022.

Dan langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh ialah:

Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang tertunda pelaksanaannya dan dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2022 dengan memprioritaskan sub kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	IV
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Hukum.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.3 Isu Strategis dan Permasalahan	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Visi dan Misi	3
2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	4
2.3 Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	7
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	8
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	11
3.4 Analisis Efisiensi Sumberdaya	15
3.5 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut	17
BAB IV PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kota Semarang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum. Dasar hukum organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, dan Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan Bidang Pendayagunaan Infrastruktur;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD;
4. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
5. penyelenggaraan kerja sama Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan Bidang Pendayagunaan Infrastruktur;
6. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;

7. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD;
9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
10. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 ISU STRATEGIS DAN BERBAGAI PERMASALAHAN

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, hasil telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, hasil telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah, hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Semarang melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan dari perkotaan hingga ke pelosok perdesaan belum memadai dan perlu peningkatan untuk kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah.
2. Belum optimalnya fungsi drainase gorong-gorong mengakibatkan timbulnya genangan dan mencegah terjadinya banjir.
3. Kondisi dan fungsi jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya perlu perbaikan untuk mencegah terjadinya kebocoran air.
4. Pelayanan kepada masyarakat agar dapat diterapkan sesuai dengan standar pelayanan publik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

Sesuai dengan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengacu pada visi dan misi Walikota Semarang terpilih yaitu,

“Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat yang Berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI Berbhinneka Tunggal Ika”

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial;
- b. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industry, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi pancasila;
- c. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan;
- d. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota;
- e. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, dalam mewujudkan misi ke-empat “Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota” tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang melaksanakan tiga program yaitu:

1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - a. Mengubah air dari masalah (banjir dan rob) menjadi potensi (water as leverage);
 - b. Smart Water Management.

2. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
 - a. Penghijauan sempadan sungai semarang.
3. Program Peningkatan Konektivitas Wilayah
 - a. Rintisan Semarang Outer Ring Road (Mangkang-Mijen) dan Middle Ring Road (Jalan Gajah)
 - b. Pembangunan akses perguruan tinggi (Srandol-Sekaran, Undip-Jangli-Mrican, Sekaran-Tinjomoyo)

2.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan rumusan tersebut maka ditentukan Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagaimana berikut:

**Tabel 2.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang**

Visi: “Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat yang Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Berbhinneka Tunggal Ika”			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.	1. Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.	1. Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob.	1. Persentase kawasan banjir; 2. Persentase kawasan rob.

	2. Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap.	1. Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan; 2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD.	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap; 2. Persentase jembatan dalam kondisi baik; 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
--	--	---	---

2.3 PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan sedangkan Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan juga merupakan aspek operasional nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Secara umum indikator kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	1. Persentase kawasan banjir	3,02%
		2. Persentase kawasan rob	1,85%
2.	Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap	92,50%
		2. Persentase jembatan dalam kondisi baik	55,75%
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	74,50%

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai, yang mencakup kebijakan, program dan kegiatan. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota

Semarang sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tabel 3.

Alokasi Anggaran Program Kegiatan Tahun 2022
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

	PROGRAM		ANGGARAN	Persentase
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	31.740.116.478	7,78
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.	25.834.082.945	6,34
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp.	86.837.138.645	21,29
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	263.377.801.007	64,59
JUMLAH			407.789.139.075	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Evaluasi Kinerja dilakukan dengan cara menghitung Pengukuran Kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program/ kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran evaluasi kinerja, selain dari aspek keuangan juga dikaji melalui aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Evaluasi yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang untuk input meliputi :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Dana baik DAU maupun DAK yang terdiri dari:
 - a. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung
 - b. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.
Capaian Kinerja Tahun 2022
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET	REALISASI
NO	URAIAN	NO	URAIAN			
1		2		3	4	5
1	Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	1	Persentase kawasan banjir	%	3,02%	2,37%
		2	Persentase kawasan rob	%	1,85%	1,11%
2	Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	92,50	92,52
		2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	55,75	86,45

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan pada Tabel Capaian Kinerja Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara rinci capaian masing-masing sasaran strategis dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1) Terwujudnya Manajemen Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan

Optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang

INDIKATOR KINERJA		Tahun 2022			Realisasi tahun 2021
		Target	Realisasi	Satuan	
1.	Persentase kawasan banjir.	3,02%	2,37%	%	3,40%
2.	Persentase kawasan rob.	1,85%	1,11%	%	2,00%

Pada tahun 2022 realisasi kinerja yang dicapai adalah mencapai 2,37% untuk persentase kawasan banjir dan 1,11% untuk persentase kawasan rob. Dengan tercapainya target tersebut berdampak pada berkurangnya kawasan banjir dan rob di Kota Semarang.

2) Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap

Meningkatnya fungsi dan manfaat sarana dan prasarana jalan, jembatan yang optimal

INDIKATOR KINERJA		Tahun 2022			Realisasi tahun 2021
		Target	Realisasi	Satuan	
1.	Persentase jalan dalam kondisi mantap.	92,50	92,52	%	92,38
2.	Persentase jembatan dalam kondisi baik.	55,75	86,45	%	NA

Pada tahun 2022 realisasi kinerja yang dicapai yakni sejumlah 92,52% untuk persentase jalan dalam kondisi mantap dan 86,45% untuk persentase jembatan dalam kondisi baik. Dengan tercapainya target tersebut manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang ialah kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Kota Semarang yang semakin baik.

Capaian pada urusan Pekerjaan Umum dicapai melalui beberapa kegiatan yang berhasil dilaksanakan, antara lain :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2021
	Target	Realisasi	Satuan	
1. Persentase perencanaan dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum	100	100	%	100
2. Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan dinas pekerjaan umum	100	100	%	100
3. Persentase peningkatan kemampuan ASN dinas Pekerjaan Umum	100	100	%	100

Pada tahun 2022 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target 100%.

Dengan tercapainya target tersebut bermanfaat pada lancarnya kinerja OPD dalam melaksanakan program kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta terpenuhinya belanja jasa penunjang administrasi perkantoran, pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan berkala gedung kantor dan kendaraan operasional dinas, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan OPD, penyusunan LKPJ, LAKIP, RENJA, RKA dan DPA OPD serta pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun.

2) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2021
	Target	Realisasi	Satuan	
1. Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	97,57	98,26	%	97,30

Pada tahun 2022 kinerja yang dicapai yakni mencapai target presentase tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob sejumlah 98,26%.

Dengan tercapainya target tersebut bermanfaat pada terpeliharanya jaringan irigasi di Kota Semarang.

KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai karena berhasil dilaksanakannya operasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir, operasi dan pemeliharaan embung/penampung air lainnya, operasi dan pemeliharaan polder/kolam retensi.

3) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2021
	Target	Realisasi	Satuan	
1. Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	64,00	64,00	%	NA

Pada tahun 2022 kinerja yang dicapai adalah mencapai target sejumlah 64%.

Dengan tercapainya target tersebut berdampak pada tersedianya saluran drainase / gorong-gorong dalam kondisi baik.

KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai karena terwujudnya perbaikan saluran drainase/gorong-gorong wilayah Kota Semarang.

4) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			REALISASI TAHUN 2021
	Target	Realisasi	Satuan	
1. Tingkat Kualitas Infrastruktur jalan jembatan	74,13	89,49	%	73,95

Pada tahun 2022 kinerja yang dicapai adalah persentase tingkat kualitas infrastruktur jalan jembatan sejumlah 89,49%.

Dengan tercapainya target tersebut bermanfaat pada terpeliharanya sarana dan parasaran jalan dan jembatan dalam kondisi baik.

KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan terwujudnya pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Kota Semarang, serta Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan wilayah Kota Semarang.

1.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada Tahun 2022 didukung dengan anggaran yang direncanakan sejumlah **Rp. 407.789.139.075,-** dan terealisasi sejumlah **Rp 375.321.769.229,-** dengan capaian kinerja anggaran sebesar **92,04 %**. Capaian Kinerja Keuangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.
Rincian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Jumlah Rp		
		Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
DINAS PEKERJAAN UMUM				
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.740.116.478	30.585.407.930	96,36
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.000.000	41.722.250	99,34
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	14.952.000	99,68
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	1.962.000	98,10
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	2.488.000	99,52

01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	2.975.750	99,19
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.500.000	4.425.500	98,34
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	4.954.000	98,08
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.965.000	99,65
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.742.491.534	16.095.178.955	96,13
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.545.889.374	15980.811.155	96,58
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	190.230.000	108.000.000	56,77
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.633.600	1.629.800	99,77
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.369.280	2.369.000	99,99
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.369.280	2.369.000	99,99
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.959.900	7.340.250	81,92
03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.479.950	4.430.250	98,89
03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.479.950	2.910.000	64,96
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.806.080	-	0,00
05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.867.980	-	0,00
05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.938.100	-	0,00
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.887.520.444	1.717.999.680	91,02
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	228.761.706	222.498.693	97,26
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	520.772.011	456.900.950	87,74
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	48.796.635	81,33
06.05	Penyediaan Barang Cetak dan			85,88

	Penggandaan	163.937.810	140.783.310	
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	4.995.000	99,90
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	92.352.000	81.369.500	88,11
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	322.375.395	271.294.632	88,15
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	494.321.522	491.360.960	99,40
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	226.557.410	150.583.100	66,47
07.05	Pengadaan Mebel	226.557.410	150.583.100	66,47
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.088.933.271	9.875.398.604	97,88
08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.996.000	36.711.000	91,79
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.100.782.672	4.092.579.464	99,80
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.948.154.599	5.746.108.140	96,60
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.734.847.839	2.697.185.091	98,62
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.800.000.000	1.799.069.532	99,95
09.05	Pemeliharaan Mebel	50.000.000	49.148.025	98,30
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204.594.159	172.523.330	84,32
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	680.253.680	676.444.204	99,44
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	25.834.082.945	23.895.488.277	92,50
2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.121.624.810	21.227.716.708	91,81
01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kostruksi Bendungan, Embung, dan	988.356.650	926.067.675	93,70

	Bangunan Penampung Air Lainnya			
01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	2.000.000.000	1.864.355.470	93,22
01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	2.735.554.294	2.590.083.694	94,68
01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	16.397.713.866	14.884.477.949	90,77
01.56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1.000.000.000	962.731.920	96,27
2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.712.458.135	2.667.771.569	98,35
02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	214.490.055	208.842.140	97,37
02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.497.968.080	2.458.929.429	98,44
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	86.837.138.645	77.710.215.107	89,49
2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	86.837.138.645	77.710.215.107	89,49
01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.124.468.987	1.107.115.591	98,46
01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	22.321.148.000	16.747.703.569	75,03
01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	42.437.025.658	41.253.553.928	97,21
01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	20.954.496.000	18.601.842.019	88,77
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	263.377.801.007	243.130.657.915	92,31
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	263.377.801.007	243.130.657.915	92,31
01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.124.468.987	1.107.115.591	98,46

01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	60.400.000.000	57.047.657.509	94,45
01.03	Pengelolaan Leger Jalan	330.816.577	320.839.250	96,98
01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	664.970.049	656.805.323	98,77
01.05	Pembangunan Jalan	31.469.563.523	26.059.770.007	82,81
01.09	Rehabilitasi Jalan	47.665.549.432	41.215.287.405	86,47
01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	47.391.733.104	44.966.070.490	94,88
01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	54.278.963.614	53.507.906.460	98,58
01.12	Pembangunan Jembatan	15.400.000.000	13.949.382.720	90,58
01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.000.000.000	706.689.180	70,67
01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.983.360.932	1.931.219.874	97,37

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran, meskipun dengan keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) dan sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang semua target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

3.4 ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi 3 yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasaran serta anggaran. Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang didukung oleh 138 orang pegawai ASN dan 454 orang pegawai Non ASN serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 6.
Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022

No	Uraian Jenis Aset	2021			2022		
		Jumlah (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	%	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	%
1	Gedung Kantor	68	68	100	68	68	100
2	Alat-alat Berat						
	a. Asphal Finisher	1	1	100	1	1	100
	b. Aspal Sprayer	2	2	100	2	2	100
	c. Buldozer	2	2	100	2	2	100
	d. Baby Roller	2	1	67,5	2	1	67,5
	e. Col Milling Machine	1	1	89,6	1	1	89,6
	f. Crane Gantung	1	1	50	1	1	49
	g. Excavator	10	10	100	10	10	100
	h. Tandem Roller	12	8	66,6	12	8	66,6
	i. Tyre Roller	1	1	70	1	1	70
	j. Stamper	2	2	100	2	2	100
	k. Towed Scraper	4	4	100	4	4	100
	l. Wheel Excavator	9	9	98,5	9	9	98,5
	m. Vibration Roller	2	2	100	2	2	100
3	Alat-alat Angkut						
	a. Mobil Pick Up	36	36	92,5	40	40	94,7
	b. Dump Truck	103	72	69,9	103	72	69,9
	c. Roda Dua	51	41	80,39	51	41	80,39
	e. Mobil Station	22	17	77,2	22	17	77,2
4	Alat-alat lainnya						
	a. Komputer PC	41	32	78,04	59	50	84,7
	b. Laptop	61	28	45,9	65	32	49,2
	c. Printer	64	39	60,9	81	56	69,1
	d. Sound System	5	5	100	5	5	100
	e. Filing Kabinet	43	43	100	43	43	100
	f. Theodolit	3	3	100	3	3	100

3.5 PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, setiap tahunnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang menghadapi permasalahan baik eksternal maupun internal.

Secara umum kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah dikarenakan adanya adanya refocusing anggaran pada tahun 2020 dan 2021 maka terdapat beberapa sub kegiatan yang dianggarkan kembali pada tahun 2022.

Kegiatan yang tertunda pelaksanaannya kembali dianggarkan dan direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, untuk proses pelaksanaan lelang sudah mulai dilaksanakan bertahap mulai pada bulan Januari 2021.

Tindak lanjut yang dilaksanakan terkait permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang tertunda pelaksanaannya dan dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2022 dengan memprioritaskan sub kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP juga merupakan bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan Dasar Anggaran Satuan Kerja termasuk dana Anggaran Tambahan (APBD – Perubahan) terdiri dari Program dan Kegiatan SKPD.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pegawai dan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan seluruh Kota Semarang.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang antara lain:

1. Meningkatkan optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang.
2. Meningkatkan kondisi jalan dan jembatan.
3. Meningkatkan fungsi dan manfaat jalan dan jembatan serta infrastruktur pendukungnya.

Dengan demikian diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah sehingga tidak hanya wacana semata untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam pembangunan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan pihak-pihak terkait harus

dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.